

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Tinjauan pustaka

1.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional (HI) adalah suatu bagian dari ilmu sosial (*social science*) sebagaimana halnya ilmu komunikasi, antropologi, ekonomi, politik, sosiologi, dan sebagainya. Untuk mendefinisikan hubungan internasional sangat tidak sederhana, meskipun fokus utama dalam HI tersebut yakni negara dan interaksinya. HI merupakan disiplin ilmu yang melibatkan pada aktivitas seperti aktor-aktor non-negara, keamanan internasional, ekonomi politik internasional, aktivitas internasional, globalisasi, terorisme, *military studies*, studi wilayah, dan sebagainya. Hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai aksi-reaksi antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh para elite negara-negara yang berkuasa tersebut (*international are the relationships among the world's government*). Selain ditekankan pada politik internasional, Hubungan Internasional didefinisikan sebagai hubungan yang memiliki kontribusi langsung dalam isu-isu non-politik, seperti hukum, ekonomi, keamanan, kebudayaan, teknologi, dan sebagainya (Bakry, 2017:1-3).

Hubungan Internasional adalah studi bagi akademis aktivitas internasional. Hubungan internasional adalah kajian ilmu yang sangat penting dan sangat mempengaruhi cara hidup manusia, dimana seluruh penduduk dunia terbagi ke menjadi ke dalam komunitas politik yang terpisah, yaitu negara-negara merdeka. Secara bersamaan negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang menjadi suatu kesatuan dalam menjalankan aktivitas internasional (Jackson & Sorensen 2014:2).

Disiplin ilmu HI secara umum lebih memperhatikan tentang sekumpulan persoalan filsafat yang bersifat introspektif. Dengan perubahan yang sangat cepat pada disiplin ilmu ini dan diganti dengan skala persaingan dengan pendekatan-pendekatan teoritis. Dengan mempertanyakan mengenai dalam Hubungan Internasional memiliki batasan intelektual yang jelas dan pokok masalah yang berbeda serta penelitian interdisipliner dari bidang yang sama sangat mempengaruhi subyek tersebut. (Burchill&Linklater, 2021:13).

Penduduk dunia merupakan terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia yang merupakan alasan utama mengapa kita harus mempelajari Hubungan Internasional. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem global dan melakukan aktivitas internasional. Setiap orang di muka bumi, dengan sedikit pengecualian juga merupakan warga negara dari salah satu negara tersebut dan sangat jarang warga negara yang melebihi

dari satu negara (Triwahyuni dalam Darmayadi, 2015:41).

International Relations dideskripsikan sebagai hubungan antara pemerintah nasional di seluruh dunia. Berhubungan erat terkait politik maupun hubungan sosial seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, seperti budaya, ekonomi, dan politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh sejarah dan kondisi geografis. HI merupakan subjek besar yang tumpang tindih dengan beberapa bidang lainnya sehingga memiliki batas-batas tidak pasti. Di mana keputusan yang diambil oleh setiap pemerintah terhadap pemerintah lain. Hubungan politik antar bangsa mencakup berbagai kegiatan seperti perang, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi organisasi internasional, pertukaran budaya, diplomasi, dan lain sebagainya. Berbagai isu yang terjadi di dunia hubungan internasional, dijadikan sebagai pembuat kebijakan dari satu negara yang dapat berperilaku kooperatif atau konfliktual dengan memperluas kegiatan membantu atau berperilaku ramah atau bahkan memiliki perilaku seperti menyebabkan bahaya terhadap negara lain (Goldstein, 1996:3).

Studi hubungan internasional adalah suatu disiplin ilmu yang relatif terbilang baru keberadaannya. Pertumbuhan sebagai disiplin ilmu hubungan internasional telah dimulai sejak akhir Perang Dunia I (PD I), dan dilanjut perkembangannya yang begitu pesat pada saat akhir Perang Dunia (PD II), dengan munculnya kekuatan-kekuatan dari negara-negara

yang memiliki power cukup besar seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perkembangan dari kajian hubungan internasional diikuti dengan beberapa perdebatan besar atau disebut *Great Debate* yang mendasar terhadap paradigma yang mendasari perkembangan teori dalam kajian hubungan internasional (Saeri, 2012:2).

Selanjutnya, dalam hubungan internasional terdapat beberapa konsep umum yaitu:

- Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis yang dapat dikatakan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu dalam menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.

- Konsep Pengaruh

Konsep pengaruh dideskripsikan sebagai kemampuan pelaku politik dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain yaitu dengan cara apa yang di kehendaki pelaku tersebut.

- Kerja Sama

Dalam aktivitas Hubungan Internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerja sama internasional. Dalam memenuhi kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri, maka dilakukannya kerja sama internasional yang dilakukan oleh dua negara atau lebih..

- Analisis Sistem

Dalam Hubungan Internasional, analisis sistem di pandang sebagai fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dipisahkan, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani, 2005:29).

Dalam ilmu hubungan internasional, terdapat perilaku sebuah aktornegara nya melalui diplomasi untuk mencapai suatu kepentingan nasional nya. Dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, telah diciptakan hasil dari perkembangan diplomasi sebelumnya menjadi bentuk diplomasi yang lebih kompleks dan spesifik. Hasil dari perkembangan diplomasi tersebut menjadi suatu bentuk buah hasil diplomasi baru salah satunya yaitu paradiplomasi.

1.1.2 Paradiplomasi

Kata “*para*” dalam paradiplomasi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua makna, yaitu bermakna “dekat” atau “di samping” atau juga “berdampingan”, dan juga bermakna “di luar”, Berdasarkan *Oxford English Dictionary* jika dilihat secara etimologis. Sedangkan kata diplomasi berasal dari kata diploma atau diplo, yang dalam bahasa Yunani berarti “dilipat dua” (Szykman, 1995). Dalam hubungan internasional diplomasi dimaknai sebagai perilaku hubungan antar negara berdaulat dan upaya untuk mempromosikan negosiasi

internasional (Berridge & James, 2003). Maka istilah paradiplomasi dapat dipahami sebagai bentuk tambahan dari diplomasi tradisional dari aktor sub-negara atau sebagai "*the foreign policy of non-central government*" (Kiilo, 2006), (Aldecoa & Keating, 2013).

Menurut Soldatos (1990), paradiplomasi adalah ketika aktor sub-nasional dalam melakukan aktivitas, aksi dan kontak dengan aktor internasional baik itu negara, sub-negara, perusahaan transnasional, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, ataupun aktor-aktor lainnya. Aktivitas internasional ini bukan bagian dari kebijakan luar negeri suatu negara (pemerintah pusat), namun aktivitas internasional mereka berjalan secara bersamaan (paralel) dengan kebijakan luar negeri dari pemerintah pusat.

Paradiplomasi dilakukan oleh pemerintah daerah atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk dapat menindaklanjuti dan dibukanya hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan aktor negara di luar negeri melalui kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, keuangan, dan bidang lainnya. Pemerintah daerah hanya dapat melaksanakan kerja sama dengan negara lain yang telah memiliki hubungan diplomatik sebelumnya secara resmi dengan pemerintah pusat Indonesia. Paradiplomasi pada umumnya berkaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah yang dapat memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap proses

pembangunan berkelanjutan di daerah pemerintahan tersebut (Primawanti, H., dkk., 2023:836)

Dan bagi Kusnetsov (2015), Chatterji dan Saha (2017), menjelaskan bahwa paradiplomasi adalah upaya pemenuhan kepentingan daerah seperti ekonomi, budaya, dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah atau sub-state actor, dengan cara membangun komunikasi politik yang berkelanjutan dengan pemerintah asing atau aktor non-pemerintah melalui hubungan luar negeri. Konsep paradiplomasi muncul ketika fenomena keterlibatan sub-negara tidak terangkum oleh konsep yang „existing“, sehingga paradiplomasi terjadi karena meningkatnya tren hubungan luar negeri yang dilakukan oleh aktor subnegara akibat tidak terpenuhinya kepentingan subnegara oleh pemerintah pusat atau sebagai pemenuhan kebutuhan subnegara.

Pemerintah daerah mendapatkan kewenangan atas daerah otonomnya oleh pemerintah pusat kecuali pada bidang pertahanan, bidang politik luar negeri, kebijakan fiskal, keamanan nasional, permasalahan moneter, dan agama yang melibatkan nasional suatu negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan otonomi secara penuh, meskipun terdapat kewenangan bersama mengenai pemerintah tidak melakukan penandatanganan surat dari Inten (LoI). Inti dari jenis kemitraan ini bertujuan untuk mendapatkan

hasil yang saling menguntungkan (Alfiansyah, V., dkk, 2022:3-4).

Perspektif paradiplomasi dilakukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik bersifat koordinasi maupun sistem komando. Berbagai bentuk, isi, dan tujuan paradiplomasi dalam arti luasnya adalah pertemuan lintas negara yang dilakukan oleh pemerintah non-pusat dengan alasan kegiatan internasional pemerintah non-pusat merupakan bagian politik atau terutama ekonomi, sosial, atau lingkungan yang membangkitkan kepentingan dan kekhawatiran pihak pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri nasional. Namun Soldatos (1990), menjelaskan ada empat kemungkinan yang dilakukan dalam kebijakan paradiplomasi pemerintah non-pusat dengan pemerintah pusat yaitu;

- 1) *Secessionist fragmentation Policy* yaitu pemisahan kebijakan pusat dan non-pusat dalam persiapan untuk pemisahan diri secara teritorial. Ini biasanya terjadi pada non-pusat yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau ingin merdeka.
- 2) *Tight centralization in foreign policy* yaitu memperkuat kebijakan luar negeri pusat sebagai reaksi terhadap terlalu banyak aktor yang terlibat dalam kebijakan luar negeri. Dasar pemikiran ini adalah untuk sentralisasi kebijakan sebagai pencegahan situasi yang tidak diinginkan dalam semua bidang isu.

- 3) *Combinative foreign policy* yaitu adanya kombinasi kebijakan luar negeri pusat dan non-pusat dengan melakukan koordinasi kebijakan luar negeri selain dalam hal keamanan nasional.
- 4) *Co-operative/competitive segmentation* yaitu campuran antara kerjasama dari pihak pemerintah non-pusat dan pusat di beberapa bidang isu. Seperti dalam kasus Quebec dan provinsi Kanada lainnya, dengan pembentukan misi provinsi terpisah di luar negeri.

Panayotis Soldatos berpendapat bahwa proses desentralisasi yang terkoordinasi dalam kebijakan luar negeri hadir ketika pemerintah pusat bergabung dengan unit subnasional, mengoordinasi atau memantau inisiatif internasional subnasional, dan mengelola untuk menyelaraskan berbagai kegiatan trans-kedaulatan dengan miliknya sendiri. Oleh karena itu desentralisasi dapat meningkatkan persatuan dan efisiensi dalam melakukan paradiplomasi.

Kemudian Brian Hocking (1993) menciptakan multi-layered diplomacy, yaitu paradiplomasi yang dilakukan dengan keterlibatan pemerintah maupun non-pemerintah dalam menjalankan interaksi secara nasional maupun internasional. Konsep multi-layered diplomacy dapat bersifat hierarki maupun horizontal. Paradiplomasi ditunjukkan dengan tatanan pemerintahan yang bersifat hierarki, di mana khususnya pada negara kesatuan pemerintah pusat memiliki wewenang yang lebih besar

dibandingkan dengan pemerintah daerah, sedangkan secara horizontal, dilihat dari sisi kewilayahannya yang setara tanpa adanya perbedaan dalam memberikan wewenang (Hocking, 1993).

Kemudian multilevel governance, yaitu adanya sistem hierarki di antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan aktor non-pemerintah yang dibentuk antara pemerintahan dan non-pemerintahan dalam melakukan paradiplomasi. Multilateral diplomacy, yaitu adanya beberapa aktor yang terlibat di dalam pembentukan kebijakan sehingga ada keterlibatan mengenai pembentukan dari diplomasi yang disebut dengan multistakeholder diplomacy (Hocking, 2006).

Multitrack diplomacy adalah keterlibatan para aktor dalam melakukan diplomasi, di mana diplomasi tidak hanya dilakukan oleh multistakeholder terkait, tetapi juga aktor lain yang berada di bawah pemerintah pusat. Selain itu, paradiplomasi juga dapat dilakukan terhadap publik global, di mana apabila dilakukan melalui paradiplomasi federal, maka output dari paradiplomasinya adalah kebijakan atau aksi yang ditujukan pada sasaran paradiplomasinya. Selain itu, suatu subnegara juga dapat mengeluarkan *domestic foreign policy* atau kebijakan luar negeri daerah yang dihasilkan dari kebijakan luar negeri pemerintah pusat apabila menerapkan paradiplomasi kesatuan, sedangkan di dalam paradiplomasi federal menerapkan *domestic foreign policy* terhadap sasaran paradiplomasinya tanpa harus meminta izin dari pemerintah pusat, karena

seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bersifat koordinasi (Duchacek I. , 1990).

Kusnetsov (2015), berpendapat bahwa paradiplomasi terjadi karena didorong oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari globalisasi, regionalisasi, demokratisasi serta domestikasi kebijakan luar negeri dan internasionalisasi kebijakan domestik. Sementara itu faktor internal dipengaruhi oleh desentralisasi dan federeliasasi, permasalahan proses *nation-building*, efektivitas pemerintah pusat dalam hubungan luar negeri, ketimpangan PDB, stimulus dari luar daerah, pengaruh pemimpin daerah atau partai politik, dan pengaruh letak geografis yang berkaitan dengan perbatasan.

Pemahaman paradiplomasi ini digunakan untuk membantu periset dalam menjelaskan upaya paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah aksi aksi, usaha, dan juga ikhtiar dari aktor sub-nasional dalam membantu aktor pemerintah nasional mencapai kepentingannya, sebagai usaha yang lebih luas untuk memenuhi kepentingan sub-nasional mereka sendiri. Kemudian ini menjadi kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri untuk pengembangan sumber daya yang semakin meningkat urgensinya di daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam paradiplomasi suatu konsep upaya kerjasama atau program, persahabatan antara sub-negara yang bertujuan untuk meningkatkan

kemajuan ekonomi, menjalin kesepahaman atau saling pengertian, serta menjalin hubungan persahabatan melalui pertukaran budaya, pendidikan, teknologi, pendidikan dan sumber daya manusia (SDM), untuk menciptakan perdamaian secara luas mengenai konsep efektivitas.

1.1.3 Aktor Sub-Negara Dalam Hubungan Internasional

Paradiplomasi secara relatif merupakan masih termasuk fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomasi mengarah kepada perilaku dan aktivitas dalam melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub-state*. dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. (Wolff, 2009).

Aktor sub-nasional yang berada di bawah pimpinan pemerintah pusat atau di bawah aktor non-negara, seperti Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka, memiliki peran penting di tengah kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah atau biasa disebut sebagai otonomi daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah, aktor sub-nasional dapat mengatur kepentingan daerahnya secara mandiri. Meskipun memiliki wewenang atas daerah otonomnya, aktivitas paradiplomasi yang dilaksanakan oleh aktor sub-nasional harus seimbang dan selaras dengan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, terutama di negara kesatuan yang kebijakan luar negerinya tetap diatur dan dibawah pengawasan pemerintah pusat (Thontowi 2009:154).

Melihat pendapat dari Rosenau, yaitu hubungan antar pemerintah selain negara yang memiliki pola cukup rumit dan mengalami perkembangan daripada pola yang sudah tetap dan tidak lagi eksklusif dimiliki oleh negara dan pemerintahan nasionalnya. Pola yang terdapat di dalam aktivitas Hubungan Internasional seperti konflik dan kerja sama internasional dapat melibatkan aktor-aktor lain seperti *sub-state Governments, Non-Governmental Organisations (NGOs), Multi National Corporates* dan Rezim International. (Rosenau, 1997).

Dalam melaksanakan paradiplomasi, terdapat syarat yang wajib dipatuhi oleh aktor sub-nasional ketika akan melaksanakan aktivitas internasional adalah kedua aktor sub-nasional harus memiliki hubungan diplomatik satu sama lain misalnya Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka. Selain itu, terdapat ketentuan lainnya yaitu aktivitas internasional dilandaskan atas dasar urusan dan kepentingan pemerintah daerah, aktor sub-nasional Indonesia tidak diperbolehkan mendirikan kantor perwakilan di luar negeri, kemudian pihak asing tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan pemerintah dalam negeri, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah (Kementerian Dalam Negeri 2020).

Studi yang dilakukan oleh David Crickemans menunjukkan bahwa terdapat dua kecenderungan dalam hubungan pusat dan daerah dalam kedaulatan di bidang hubungan internasional ini, yakni ada yang bersitat

kooperatif dan ada pula yang konfliktual. Paradiplomasi yang cenderung kooperatif kepada pemerintah pusat, meski masih terdapat kesan kompetitif, yang dipraktikkan oleh Flanders, Wallonia, dan Bavaria, sedangkan interaksi luar negeri yang dilaksanakan oleh Scotland dan Catalonia cenderung konfliktual (Crikemans, 2008).

Duchacek menyebutkan "...regions establish permanent offices in foreign capitals or centres of commerce and industry abroad...". Pernyataan tersebut memiliki pengertian bahwa pemerintahan kota atau provinsi dapat mendirikan kantor di pusat kota yang dituju atau di pusat perdagangan dan industri di luar negeri, yang merupakan termasuk dalam konsep paradiplomasi yang sedang ramai dilakukan oleh negara-negara di Eropa ini. Hal ini untuk memudahkan pemerintah kota dalam melaksanakan negosiasi atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara terkait dengan persoalan yang menyangkut kepentingan kota tersebut. Kegiatan paradiplomasi Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kondisi Indonesia yang terdapat pada perjanjian perdagangan bebas, seperti AFTA dan ASEAN *Community* 2015 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, merupakan contoh *typology* terakhir yang dikemukakan oleh Duchacek (Ivo & Duchacek, 1990:14)..

Hubungan yang tidak lagi bersifat *state centris* di mana aktor-aktor non-pemerintah dapat secara terang-terangan melakukan hubungan luar negeri dengan tanpa melibatkan pemerintah pusat dalam kerjasama luar

negeri oleh daerah otonom jika dilihat dari sudut pandang studi hubungan internasional, secara teoritis. Dalam hubungan yang '*non-state centris*' ini, aktor-aktor dapat berwujud INGO, *foundation*, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional dan birokrasi pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di NKRI dengan hukum yang berlaku di negara asing yang akan bekerjasama, dimana beberapa gubernur/walikota dari negara asing dapat langsung membuat menandatangani kerjasama internasional tanpa '*full power*' dari pemerintah pusatnya (contoh : Prefektur Shizuoka, Jepang dan Provinsi Jawa Barat, Indonesia).

Aktor sub-nasional menurut Whytock (2019:102), merupakan suatu kewenangan aktor tersebut dalam memiliki hak otonomi dan dapat berjalan secara mandiri dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, berbeda dengan negara (*state*) yang merupakan aktor kesatuan (*unitary actors*) yang disusun oleh aktor-aktor subnasional. Hal tersebut bersatu menjadi satu kesatuan dan membentuk suatu negara. Kemudian, negara tersebut akan siap menghadapi dunia luar sebagai aktor yang menjadi satu unit kesatuan yang terpadu dalam menjalin hubungan antar negara (*interstates*)

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan berwirausaha yang lebih berorientasi bisnis dan dorongan untuk menghasilkan sumber daya manusia terbaru yang mampu mengarahkan dan mengimplementasikan perkembangan manajemen

publik menjadi perubahan-perubahan mendasar yang berhubungan dengan tren perubahan manajemen publik. Perkembangan manajemen publik dalam rangka menciptakan seperangkat kompetensi baru yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintah menjadi sebuah tantangan terkait dengan tekanan-tekanan yang diciptakan, yang mana pegawainya harus mengedepankan produktivitas secara terus-menerus dan berorientasi pada kinerja yang baik, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan untuk dapat lebih mampu menempatkan perubahan organisasi, lebih banyak membangun kerja sama /berorientasi jaringan relasi, dan mampu mengatur agenda yang saling bertentangan. Serta mengelola sumber daya fisik, keuangan, dan / atau manusia yang langka lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya (Billis, 2003).

Pemerintah tidak dapat merekrut dan merekrut orang-orang berbakat di waktu dan tempat yang tepat, dan jika hal tersebut tidak dapat memotivasi, mengembangkan, dan pertahankan individu-individu itu, maka kinerja pemerintah akan lebih baik, maka pusat dari upaya reformasi sektor publik kontemporer merupakan Reformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) (Saide dan Stewart, 2005). Akibatnya, di beberapa negara, model tradisional manajemen SDM Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) telah tergantikan oleh model manajemen staf yang baru. Pola konvensional "manajemen ayah" telah

memberi jalan bagi "manajemen rasional" (Budhwar dan Boyne, 2004). Praktik ketenagakerjaan yang selaras dan sesuai standar telah digantikan oleh fleksibilitas dan diferensiasi.

Dalam hal ini memerlukan transformasi signifikan pada fungsi sumber daya manusia pada umumnya khususnya dalam tanggung jawab pengembangan sumber daya manusia (SDM), menciptakan peluang kerja khusus bagi karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang diperlukan dan mendorong peluang pengembangan diri yang lebih tinggi dalam melakukan pelaksanaan publik. Reformasi manajemen. (Wang dan Mclean, 2002).

Berkontribusi pada hasil implementasi reformasi manajemen publik dan proses modernisasi merupakan Salah satu tujuan pelatihan dan pengembangan yang paling penting. Namun, fakta mengenai penyelarasan tujuan pelatihan dan pengembangan dengan strategi Reformasi Manajemen Publik masih kurang terimplementasi (World Bank, 2006).

Pelatihan merupakan bentuk proses seorang tenaga kerja untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan baru untuk melakukan suatu pekerjaan. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, serta dapat digunakan dalam pekerjaan mereka saat itu juga. Hal tersebut menjelaskan bahwa selama kegiatan pelatihan, karyawan diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuannya pada suatu pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang diberikan

biasanya sudah ditentukan sesuai kebutuhan suatu organisasi/perusahaan, hal tersebut berarti bahwa pelatihan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek (Mathis et al., 2010)

Pengembangan sumber daya manusia lebih fokus pada kebutuhan umum jangka panjang dalam organisasi. Dalam hal tersebut terdapat ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Berbeda dengan pelatihan, dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan tersebut dilakukan untuk menyiapkan individu untuk memegang tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam suatu organisasi (Sunyoto & Danang, 2012:145).

Selain itu, ada pun sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wadah bagi pengembangan. Untuk itu, maka diperlukan SDM yang kompeten sebagai aset dalam proses pengembangan dan SDM yang kompeten tersebut dicapai melalui proses pendidikan dan pengembangan. Dengan demikian, SDM menjadi bagian penting dalam pengembangan dan pendidikan (Sikula, 1981: 38)

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang setidaknya terdapat empat komponen utama dalam

pendidikan, yaitu: SDM, dana, sarana, perasarana, dan kebijakan yang saling terkait secara fungsional bagi tercapainya SDM yang berkualitas. Komponen SDM dapat dikatakan menjadi komponen strategis, karena dengan SDM berkualitas dapat mendayagunakan komponen lainnya, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pendidikan. Di mana SDM berkualitas dapat dicapai dengan pengembangan SDM. (Sikula, 1981: 38)

Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Seperti dikemukakan Sikula. Pengembangan merupakan upaya meningkatkan sesuatu agar lebih bertambah baik. Sikula (1981: 38):

“development in reference to staffing and personnel matters, is a long term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personel learn conceptual and theoetical knowledge for general purpuses. Training is a short term educational process utilizing a systematic and orgenized procedure by whichnonmanagerial personnel learn technical knowledge and skill for a definite purpose”.

Selain itu, Hasibuan (2007: 69) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan teoretis, teknis, konseptual, dan sikap karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan di suatu organisasi/perusahaan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan dalam definisi lain, pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu

merupakan proses peningkatan keterampilan kerja, baik secara teknis maupun konseptual. Dimana, pendidikan berpusat pada teori yang berlangsung lama, sedangkan latihan berorientasi pada praktik dengan waktu relatif singkat.

Dalam riset ini, periset menggunakan paradigma upaya paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi baik itu aksi aksi, usaha, dan juga ikhtiar dalam membantu pemerintah nasional dalam menangani isu sumber daya manusia. Konsep dari upaya paradiplomasi tersebut difokuskan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia yang sebagaimana menjadi fokus utama dalam masalah penelitian ini mengenai paradiplomasi Pemerintah Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam pengembangan sumber daya manusia, yang ditujukan sebagai pengembangan potensi masyarakat Provinsi Jawa Barat melalui program pertukaran pelajar, job fair, dan pelatihan tenaga kerja.

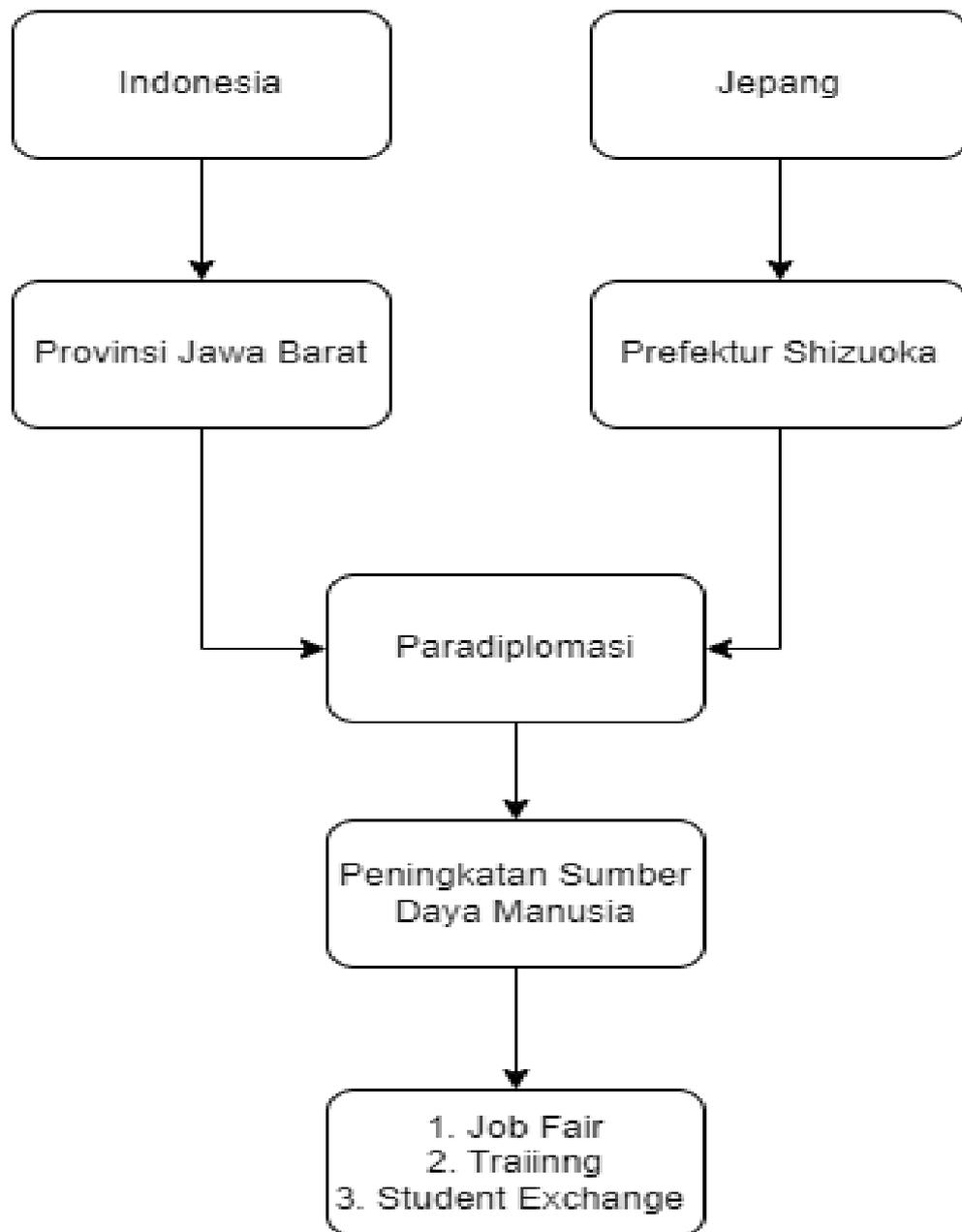
1.2 Kerangka Pemikiran

Dalam riset ini, periset menggunakan paradigma paradiplomasi sebagai landasan dalam menjelaskan bahwa hubungan luar negeri tidak hanya berfokus kepada negara sebagai aktor utama (*state-centric*), tetapi melihat sub-nasional juga merupakan aktor dalam melakukan hubungan luar negeri. Aktor Sub-nasional dalam berinteraksi dengan sub-nasional di negara tujuan adalah dengan menjalin hubungan luar negeri daerah. Aktivitas yang dilakukan oleh aktor sub-nasional tersebut merupakan suatu kewenangan yang didapatkan sebagai daerah

otonom untuk melakukan kepentingannya secara mandiri, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas aktor sub-nasional tersebut masih di bawah pengawasan Pemerintah Pusat sebagai aktor negara dalam hubungan internasional.

Indonesia dan Jepang merupakan negara yang menaungi aktivitas antar aktor sub-nasional, sebagaimana dijelaskan pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang serta Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan mengenai syarat dan tata cara melakukan aktivitas internasional oleh aktor sub-nasional. Sehingga, aktivitas internasional yang dilakukan oleh sebuah aktor sub-nasional dipengaruhi oleh adanya aktor negara dalam hubungan internasional itu sendiri.

Hubungan luar negeri daerah yang terjalin antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan Prefektur merupakan konsep dari paradiplomasi yang disebut *sister province*. Paradiplomasi adalah sebuah konsep bagi sebuah daerah melakukan aktivitas luar negeri dengan daerah lain sebagai bentuk dari hubungan *sub-state* yang dilakukannya. Fokus dalam riset ini adalah upaya paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi baik itu aksi aksi, usaha, dan juga ikhtiar dalam membantu pemerintah nasional dalam menangani isu sumber daya manusia.



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

